



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN PEMILU SERENTAK 2024
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL 23 – 25 JANUARI 2024**

Pada Rabu Tanggal 24 Januari 2024 Komisi II DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja Spesifik Persiapan Pemilu Serentak 2024 ke Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Pertemuan dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati Grobogan. Dalam kunjungan tersebut Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI diterima langsung oleh Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Restuardy Daud, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima, Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo, Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti, Forkompimda Kab. Grobogan dan para pimpinan OPD Kabupaten Grobogan. Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI Riyanta, SH dalam pengantar pertemuan menyampaikan fokus kunjungan kerja kali ini adalah evaluasi tahapan pencalonan Anggota DPRD, validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Grobogan, dan seperti apa bentuk fasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan untuk kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024. Selain itu, Komisi II ingin mengetahui dalam pengadaan dan distribusi Logistik perlengkapan pemungutan suara oleh Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan, serta perkembangan pelaksanaan tahapan kampanye dan hasil pengawasan atas netralitas ASN dan TNI/Polri di Kabupaten Grobogan.

Sementara itu, Wakil Bupati Grobogan dr Bambang Pujiyanto, M.Kes melaporkan bahwa sejauh ini tidak ada persoalan yang menghambat persiapan pemilu 2024 dan secara umum kondisi keamanan cukup kondusif. Disampaikan juga oleh Wakil Bupati Grobogan bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih, maka proses perekaman KTP telah mencapai 99,8 %, capaian tersebut didapat dengan program jemput bola. Namun kendala yang ditemui adalah jumlah blangko KTP yang diterima hanya mencukupi untuk program regular. Oleh karena itu, Pemkab Grobogan telah meminta tambahan alokasi blangko KTP ke Kemendagri. Terkait dukungan sarana dan prasarana untuk penyelenggara pemilu, Pemkab Grobogan telah memberikan hibah tanah kepada KPU Grobogan dan Bawaslu Grobogan. Untuk itu Pemkab Grobogan berharap agar KPU RI dan Bawaslu RI segera membangunkan Gedung untuk KPU Grobogan dan Bawaslu Grobogan. Karena hingga saat ini baik KPU dan Bawaslu masih memakai bangunan milik Pemkab Grobogan. Dalam kesempatan yang sama,

Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Grobogan memberikan tambahan informasi terkait anggaran BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan untuk penyelenggara pemilu ad hoc. Dimana hingga saat ini, iuran BPJS untuk penyelenggara pemilu ad hoc belum dapat dianggarkan Pemkab Grobogan. Permasalahan tersebut terjadi karena surat edaran Kemendagri terkait penganggaran BPJS diterima Pemkab Grobogan setelah APBD tahun 2024 Kab. Grobogan disetujui DPRD Kab. Grobogan. Oleh karena itu, hingga saat ini anggaran iuran BPJS bagi penyelenggara pemilu *ad hoc* belum dapat dialokasikan. Dan Pemkab Grobogan masih menunggu arahan dari Kemendagri.

Dalam pertemuan tersebut, KPU Kabupaten Grobogan memberikan pemaparan terkait persiapan pemilu. Menurut Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo, persiapan akhir telah dilakukan terutama terkait pengadaan dan logistik pemilu. Dimana saat ini KPU Grobogan sedang dalam proses pengepakan untuk memasukkan kertas suara dalam sampul dan akan segera didistribusikan ke PPK dan PPS dalam waktu dekat. Menurut Agung Sutopo, pengepakan dilakukan di Gedung Serbaguna Kabupaten Grobogan dan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Dalam pantauan KPU Grobogan jumlah surat suara yang rusak hanya sejumlah 0,1 % dan sudah dilaporkan ke KPU. Selain itu, Ketua KPU Grobogan juga melaporkan bahwa pada hari ini tanggal 24 Januari 2024 sedang dilaksanakan bimbingan teknis kepada para KPPS. Dan, pada tanggal 25 Januari 2024 para KPPS tersebut akan dilantik.

Sedangkan Bawaslu Kab. Grobogan Fitria Nita Witanti juga memberikan penjelasan terkait pengawasan terhadap pentahapan pemilu seperti dalam pencalonan. Dimana Bawaslu Kab. Grobogan masih sangat terbatas dalam mengakses Sistem Informasi Pencalonan (silon) karena pihak Bawaslu hanya dapat melihat informasi secara umum, seperti, nama, tempat tanggal lahir, Pendidikan dan organisasi. Sementara data pribadi dan berkas pengajuan calon hingga saat ini belum dapat dilihat. Terkait keterwakilan Perempuan, hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) keterwakilan Perempuan mencapai 39,05%. Terkait pengawasan penyebaran distribusi logistik pemilu, Bawaslu ikut serta dalam mengawasi setiap masa pengadaan maupun distribusi logistik agar mampu melakukan pencegahan bila terjadi pelanggaran.

Pada akhir kunjungan, Tim Kunspek Komisi II DPR RI meninjau langsung proses persiapan logistik pemilu di Gedung Serbaguna Kabupaten Grobongan dengan didampingi Ketua KPU Grobogan dan para pejabat Kabupaten Grobongan.

Kabupaten Grobogan, 25 Januari 2024,
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.